

**DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP KEMAJUAN
PEMBANGUNAN PADA MASA
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I (1136-1171 H / 1724-1757 M)**

Leni Mastuti

Program Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
lenimastuti179@gmail.com

Abstrak

Peneliti menggunakan pendekatan historis atau sejarah. Untuk itu, aspek historis yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait dengan tempat, waktu, latar belakang, pelaku sejarah, serta mendeskripsikan suatu gejala yang telah terjadi dimasa lampau. Pendekatan ekonomi turut digunakan sebagai penguat teori sejarah yang sudah ada. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptik analitik, yaitu sebuah teknik pembahasan dengan cara memaparkan masalah dengan analisa, dan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai peran SMB I terhadap pembangunan di Kesultanan Palembang (1724-1757 M). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kondisi perekonomian pada masa SMB I berjalan dengan baik. Bentuk-bentuk kebijakan SMB I telah memberikan keuntungan bagi perekonomian Kesultanan Palembang. Adanya kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi Kesultanan Palembang berdampak terhadap kemajuan pembangunan di Palembang.

Kata Kunci: Kebijakan, Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin I

Abstract

Researchers use a historical or historical approach. For this reason, the historical aspects that will be studied in this study are related to the place, time, background, historical actors, as well as describing a phenomenon that has occurred in the past. The economic approach is also used to reinforce the existing historical theory. The data analysis technique used in this research is descriptive analytic, which is a discussion technique by describing the problem with analysis, and providing an in-depth explanation of the role of SMB I on development in the Palembang Sultanate (1724-1757). The results obtained from this study are the economic conditions during the SMB I period went well. The forms of SMB I policies have provided benefits to the economy of the Palembang Sultanate. The existence of favorable economic policies for the Palembang Sultanate had an impact on the progress of development in Palembang.

Keywords: Policy, Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin I

A. PENDAHULUAN

Palembang merupakan salah satu kawasan di wilayah Nusantara yang secara historis memainkan peranan yang sangat penting.¹ Hal itu dikarenakan, di Palembang pernah berdirinya dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam yang pada saat itu menguasai jalur perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Munculnya Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17 sampai abad ke-19 telah melatar belakangi kehidupan masyarakat Palembang. Periode ini menjadi menarik ketika dihubungkan dengan dunia pelayaran dan perdagangan. Pelabuhan Palembang banyak dikunjungi oleh kapal-kapal niaga terutama dari Jawa, Madura, dan Sulawesi. Kapal-kapal ini membawa beras, garam, dan bahan pakaian dan membawa pulang lada dan timah dari Palembang.²

Tidak hanya datang dari berbagai daerah saja di Nusantara, tetapi pelabuhan di Palembang menjadi salah satu tempat perdagangan internasional yang banyak dikunjungi oleh negara-negara luar, seperti Cina, Arab dan Eropa. Meningkatnya perdagangan internasional pada masa Kesultanan Palembang juga ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi di wilayah Palembang dan sekitarnya.

Sebagai kerajaan yang berdaulat penuh, maka Kesultanan Palembang makin berkembang perekonomiannya.³ Jika melihat kondisi Kesultanan Palembang Darussalam yang strategis, ternyata Palembang pada masa itu banyak menghasilkan komoditi, seperti hasil perkebunan dan hasil bumi yang sangat dibutuhkan oleh pasaran, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena Palembang memiliki kekayaan alam yang melimpah serta pemerintah yang dapat mengelolah sumberdaya alam dengan baik, inilah yang membuat Kesultanan Palembang menjadi penting dalam hubungan perdagangan.

Kondisi perekonomian yang cukup baik di bidang perdagangan yang memberikan kontribusi penting dalam kemajuan perekonomian Kesultanan Palembang serta kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi Kesultanan Palembang yang berdampak terhadap kemajuan pembangunan di Palembang.

¹ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, Jember: Universiti Press, 2016, hlm. 15

²Nor Huda, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 22

³ Farida, *Perekonomian Kesultanan Palembang*, dalam : [Journal.unj.ac.id](http://journal.unj.ac.id). diakses pada: 3 Mei 2018

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam tesis ini berisi tinjauan terhadap hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Selain itu, tinjauan pustaka ini sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak terjadi kesamaan pembahasan.

Penelitian oleh Endang Rochmiatun dengan judul *Perubahan Ekonomi dan perkembangan peradaban Islam di Palembang Abad XVII-XIX M: Telaah atas Naskah-naskah Kontrak Sultan Palembang*, menjelaskan tentang hubungan antara perubahan dan perkembangan ekonomi selama Kesultanan Palembang, terutama di era Sultan Mahmud Badaruddin I menjelaskan juga strategi Sultan Palembang dalam memajukan ekonomi yang mampu memengaruhi perkembangan peradaban Islam di Palembang.¹⁴

Selanjutnya penelitian oleh Indri Safitri dengan judul *Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M*, penelitian ini menjelaskan sejarah perekonomian Kota Palembang pada masa Kolonial Belanda. Skripsi ini juga menjelaskan kondisi perekonomian masa Kesultanan Palembang Darussalam mulai masa awal berdirinya Kesultanan Palembang, keadaan ekonomi sebelum keruntuhan Kesultanan Palembang sampai masa Keresidenan Belanda. Dampak perekonomian terhadap perubahan sosial keagamaan masa keresidenan Palembang.¹⁵

Sepanjang pengetahuan penulis, bahwa penelitian yang berjudul Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Kemajuan Pembangunan Pada Masa Sultan Mahmud Badaruddin I (1136-1171 H / 1724-1757 M) belum ada yang meneliti dan diharapkan agar penelitian ini dapat menggambarkan informasi tersebut yang masih belum terungkap serta dapat melengkapi karya sebelumnya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagaimana penelitian kebudayaan pada umumnya yang berusaha menjelaskan realita sosial yang ingin diteliti secara mendalam dengan menggunakan data kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan James E. Anderson untuk

menganalisis dampak-dampak dari kebijakan ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I. Menurut James E. Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan.⁴

Peneliti menggunakan pendekatan historis atau sejarah. Untuk itu, aspek historis yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait dengan tempat, waktu, latar belakang, pelaku sejarah, serta mendeskripsikan suatu gejala yang telah terjadi dimasa lampau. Pendekatan ekonomi turut digunakan sebagai penguat teori sejarah yang sudah ada. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptik analitik, yaitu sebuah teknik pembahasan dengan cara memaparkan masalah dengan analisa, dan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai peran SMB I terhadap pembangunan di Kesultanan Palembang (1724-1757 M). Pendekatan sejarah ekonomi adalah pendekatan yang penting dalam penulisan sejarah karena pada dasarnya perjalanan suatu sejarah tidak pernah lepas dari pengaruh kepentingan ekonomi. Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusia, kondisi politik, kondisi sosial, dan latar sejarah.⁵

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Mengenal Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo

Sultan Mahmud Badaruddin I adalah seorang sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah antara tahun 1724-1758. Sultan Mahmud Badaruddin I merupakan anak dari Sultan Muhammad Mansur Kebon Gede bin Sultan Abdurrahman Candi Walang bin Pangeran Sido Ing Pesarean bin Pangeran Manca Negara Cirebon bin Pangeran Adipati Sumedang bin Pangeran Wira Kesuma Cirebon bin Sunan Giri. Ibunya bernama Nyimas Sengak binti Dipo Anom Priayi Jambi. SMB I dilahirkan sekitar tahun 1103 H atau 1690 M di lingkungan Keraton Palembang yang merupakan putra ke 3 dari 5 bersaudara.⁶

⁴ Mas Sugeng, *Teori Kebijakan Publik*, dalam: <http://www.topihukum.com>, 2013, diakses 1 Oktober 2018.

⁵ Indri Safitri, Skripsi: "Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M", (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), hlm. 35-38

⁶ Yayasan Masjid Agung Palembang, "Selayang Pandang Masjid Sultan Mahmud Badaruddin" Palembang: 2019, hlm. 9-11

Pendidikan awalnya didapat dari ayahnya sendiri, kemudian menuntut ilmu agama pula kepada ulama-ulama besar Palembang waktu itu, seperti: Faqih Jalaluddin, Khatib Amir, Sayid al-Idrus, dan masih banyak lagi. Selain itu SMB I juga dibekali dengan ilmu-ilmu kepemimpinan, tata negara, beladiri dan sebagainya agar kelak dapat meneruskan jalannya roda pemerintahan yang diwariskan kepadanya.⁷

Pangeran Jayo Wikramo diangkat menjadi sultan Palembang pada usia 34 tahun, Ia diangkat oleh pamannya Sultan Agung Komaruddin Sri Truno. Dinobatkan pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1136 H bersamaan tanggal 23 Maret 1724 M dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin (SMB I). Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo wafat pada tanggal 3 Muharram 1171 H bersamaan 17 September 1757 M dalam usia 68 tahun. Dimakamkan di Kawah Tekurep di Lemabang 3 Ilir Palembang.⁸

2 Kondisi Ekonomi Masa Kepemimpinan SMB I

Sistem perekonomian pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I pada dasarnya merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya sehingga sistem pendapatan pemerintahan Kesultanan merupakan pengembangan sumber perekonomian yang sebelumnya telah berlaku.⁹ Berbagai sumber pendapatan Kesultanan Palembang yaitu Sultan Mahmud Badaruddin I yang paling penting adalah bersumber dari kegiatan perdagangan, pertanian maupun pertambangan yang mengalami kemajuan dan peningkatan pada masa kekuasaan SMB I.

Sesuai dengan letaknya, perekonomian Palembang sangat dipengaruhi oleh perdagangan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Diketahui dari berbagai tulisan mengatakan bahwa sumber penghasilan Kesultanan yang lebih besar sesungguhnya berasal dari kegiatan perdagangan. Kota Palembang berfungsi sebagai pusat perdagangan yang menampung arus barang dagang dari wilayah pedalaman, sekaligus menjadi tujuan akhir barang-barang yang diekspor maupun barang yang diimpor. Pertemuan perahu-perahu dagang dari wilayah hulu maupun

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ Djoko Suryo, "Ekonomi Masa Kesultanan," dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002, hlm. 271

hilir Palembang menciptakan tumbuhnya pusat-pusat perdagangan baru. Disetiap sungai maupun di pusat-pusat keramaian dapat di jumpai dermaga-dermaga perahu dagang. Terfokusnya pertemuan perahu dagang, baik dari kawasan hulu maupun hilir, menjadikan Sungai Musi sebagai pusat perdagangan yang utama dalam bentuk Pasar Terapung.¹⁰

Woelders mengatakan dalam buku *Het Sultanaat Palembang*, bahwa pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin I diketahui bahwa setiap musim segala macam bentuk perahu dagang masuk ke Palembang dan dari Bangka membawa timah sedangkan dari Belitung membawa besi, semua barang dagang tersebut memberikan keuntungan bagi Palembang. Perdagangan pada masa kesultanan diadakan bukan hanya dari dalam wilayah kesultanan melainkan juga dari luar wilayah Palembang, seperti Pulau Jawa dan Riau, bahkan sampai keluar negeri seperti Siam dan Cina.¹¹

J.I. Van Sevenhoven mengatakan perdagangan yang terbesar pada masa Kesultanan Palembang dilakukan dengan pulau Jawa, Bangka, Cina, Riau, Singapura, Pulau Pinang, Malaka, Lingga, Siam, maupun dari pulau-pulau kecil sekitar yang datang menggunakan perahu. Barang dagang utama adalah berbagai macam kain Lina dari Jawa dan dari pantai sekitar, berbagai kain cita Eropa dan sebagainya. Selain itu berbagai barang pecah belah dari Cina, sutra kasar, benang emas, panci-panci besi, obat-obatan, teh, manisan, dan barang-barang Cina lainnya.¹² Bidang perdagangan menjadi penopang kemakmuran kesultanan dan tergambar jelas dalam buku J. Sevenhoven bahwa pada masa itu ramainya kegiatan perdagangan Palembang.

3 Bentuk-bentuk Kebijakan Ekonomi SMB I

a. Kebijakan Perdagangan

Kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin I memberikan kontribusi kebijakan bagi perkembangan ekonomi Palembang. Letak Palembang yang strategis menjadikan Palembang sebagai Bandar Perdagangan. Adanya hubungan

¹⁰ Melisa, *Ampera dan Perubahan Orientasi Ruang Perdagangan Kota Palembang 1920an-1970an*, hlm. 55-56, dalam: <https://jurnal.ugm.ac.id>. diakses pada 7 Februari 2019.

¹¹ M.O. Woelders, *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*. Gravenhage, 1975, hlm. 81

¹² J.I. Van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 56

dengan luar negeri menjadikan Palembang mengalami perkembangan perdagangan baik impor maupun ekspor. Para pedagang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan dikerajaan membawa perkembangan ekonomi di Palembang. Sehingga Sultan Mahmud Badaruddin I berhasil membawa kerajaannya mencapai kemajuan di bidang ekonomi dan politik.

Sistem perdagangan pada masa Kesultanan Palembang adalah adanya monopoli yang terpusat di tangan pihak kesultanan. Dalam kaitan dengan wilayah pedalaman, misalnya hubungan perdagangan istana kesultanan dengan kepala-kepala daerah atau rakyat di pedalaman diwujudkan dalam pola kewajiban tiban-tukon.¹³ Para pedagang bangsawan dan Sultan berperan penting dalam ekonomi perdagangan di Palembang terutama monopoli bahan perdagangan pokok selain itu dalam hal modal, kepemilikan kapal dagang, urusan perdagangan, pengelolaan Bandar serta pasar juga dipegang oleh Sultan.

b. Kontrak Dagang dengan VOC

Perkembangan kekuasaan imperialis dan kolonialis dari Eropa membuat perekonomian SMB I ikut dipengaruhi oleh hubungan dagangnya dengan kompeni. Dalam melakukan perdagangan, Sultan Mahmud Badaruddin I melakukan perjanjian dengan VOC untuk menjual hasil tambang timah yang ada di Bangka dan Belitung dengan harga yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian, yaitu Contract Palembang 10 September 1755.

“Bahwa.....perjanjian yang telah diperbuat-buat sekarang ini dibaharui pula segala perkara itu perjanjian yang zaman purbakala setelah bermufakat antara kedua pihak kampeni Belanda dengan raja yang dahulu-dahulu sekali duduk diatas tahta karajaan Palimbang dan yang demikian itu adalah sekarang ini baharui pula dengan barangperkara lain-lain. Lagi bermufakat dengan keputusan yang sempurna khair shaleh antara paduka Sri Sulthon Ratu memerintah atas tahta karajaan nagari Palimbang serta sekalian orang besar-besar dengan tuan gubernur Jenderal Jacob Musel. Jenderal dalam negeri Belanda yang memerintahkan segala rakyat- rakyatnya. Maka adalah Gubernur Jenderal dan

¹³ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Universiti Press, 2016, hlm. 79

*segala (vaan raad) India menguatkan komisaris Johanes Andreas Pada melakukan atas segala perihal ihwal yang khoir shaleh. Itu maka hendaklah bermufakat dengan keputusan yang sempurna dimaterai dengan wasiqot lil mawaddah supaya baqi adanya.*¹⁴

Pemberian hak monopoli kepada VOC merupakan strategi Sultan yang dilakukan untuk melonggarkan tekanan dari VOC. VOC memaksakan kontrak monopoli perdagangan timah dan lada kepada Sultan Mahmud Badaruddin I. Dengan pemberlakuan hak monopoli ini, para pedagang selain dari Belanda tidak boleh ikut terlibat dalam perdagangan tersebut.

c. Kebijakan Pertanian

Pada abad ke XVII perdagangan rempah-rempah semakin ramai akibat kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang saling bersaing (Inggris, Portugis, Belanda), sedangkan Lampung dan Bengkulu yang merupakan daerah penghasil lada telah dikuasai oleh Banten. Palembang yang sebelumnya mendapat lada dari daerah-daerah itu kehilangan sumber, lalu berusaha untuk memproduksi sendiri. Itulah sebabnya Sultan Palembang membujuk daerah-daerah Uluu untuk bekerjasama masalah lada, karena Sultan memegang peranan penting sebagai penyalur dan daerah Uluu sebagai produsen.¹⁵

Hasil-hasil dari kesultanan Palembang dan yang di ekspor adalah rotan ikat, damar, kapur barus, kemenyan, kayu lako, lilin, gading dan pasir emas. Barang-barang ini dikumpulkan dari hutan-hutan dari tepi-tepi sungai. Selain itu ada yang sengaja di tanam seperti lada, kopi, tebu, gambir, pinang, tembakau dan nila. Hasil-hasil lainnya adalah ikan kering dan ikan asin, barang pecah belah, tikar rotan dan jerami, karung, barang-barang dari kuningan, sutera dijaln dengan benang emas (songket) dan lain-lain dari benang kapas tenunan sendiri.¹⁶

Sultan Mahmud Badaruddin I juga melakukan pembangunan dalam bidang pertanian dengan pengairan (terusan) yang sekaligus juga menjadi sarana pertahanan pada masa itu. Menurut Farida R Wargadalem, Sultan Mahmud Badaruddin I

¹⁴ ANRI, Jakarta, Contract Palembang 10 September 1755, dalam Arsip VOC, No. 41.8

¹⁵ P. De Roo De Faille, Dari Zaman Kesultanan Palembang (terj.), (Jakarta: Bhadrata, 1971), hlm. 87

¹⁶ Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya". Dalam K.H.O. Gadjahmata dan Sri Edi Swasono (ed.), Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 99

menyuruh daerah Uluu yaitu daerah Rawas untuk menanam lada.¹⁷ Pada masa Kesultanan lada merupakan salah satu komoditi yang menguntungkan. Pada tahun 1773 Kesultanan Palembang menjual lada sebanyak 6.721 pikul kepada pihak VOC. Volume penjualan lada turun menjadi 4.141 pikul pada tahun 1774, namun meningkat kembali menjadi 6.105 pikul pada tahun 1775.¹⁸

Berdasarkan kontrak dagang yang dilakukan pihak VOC dengan Kesultanan bahwa VOC melarang penjualan timah diluar kesepakatan. Diluar kontrak Sultan melakukan perdagangan gelap dengan pihak asing selain VOC.

Perkara yang kesepuluh

..... Bahwa hendaklah ditentukan oleh Paduka Sri Sultan atau segala timah yang ada di Pulau Bangka atau di Belitung yaitu jangan sekali-kali serahkan kepada tangan lain bangsa melainkan diserahkan kepada Kompeni asal tiada kurang rial//.

d. Kebijakan Pertambangan

Salah satu komoditi yang penting pada masa Kesultanan Palembang adalah hasil pertambangan timah. Ditemukannya timah di Bangka mengundang kedatangan orang-orang asing, terutama orang Cina, yang tidak hanya bekerja di tambang-tambang itu, tetapi juga memperkenalkan pertanian dan perdagangan kepada penduduk setempat. Hutan-hutan mulai dibuka dan dibersihkan untuk membuat permukiman yang permanen.¹⁹ Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I, dibuatlah parit-parit timah di Bangka serta diperluas dengan mendatangkan pekerja-pekerja dari Siam dan Koci, selain itu cara penambangan timah mengikuti pola parit-parit timah di Johor.²⁰ Sultan bekerjasama dengan orang-orang Cina yang memiliki pengetahuan dalam hal penambangan timah. Selain orang Cina sebagai pekerja, diantara mereka juga diberikan jabatan untuk mengurus timah di Bangka.

Masa Sultan Mahmud Badaruddin I produksi timah mengalami peningkatan. Peningkatan komoditas ini dipengaruhi oleh kerjasama serta negosiasi antara Sultan dengan VOC dengan dikirimkannya timah dari Palembang ke Batavia. Semakin

¹⁷ Wawancara pribadi dengan Farida R. Wargadalem, Palembang, 25 April 2019.

¹⁸ Djohan. Hanafiah, Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989, hlm. 112

¹⁹ Frieda Amran, *Dr Thomas Horsfield dan Pulau Banka*, dalam: [Www.Beritapagi.Ac.Id](http://www.Beritapagi.Ac.Id), Diakses Pada: Jumat 12 April 2019

²⁰ K.H.O. Gadjahmata dan Sri Edi Swasono (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, Jakarta: UI-Press. 1986, hlm. 99

meningkatnya jumlah produksi timah maka akan semakin besar juga keuntungan yang didapat oleh Sultan Mahmud Badaruddin I.

e. Kebijakan Membayar Pajak

Pendapatan penting yang diperoleh Kesultanan antara lain dari penarikan bea cukai, penarikan impor dan dari ekspor, transit kapal atau perahu dagang asing, pasar di Bandar, serta pajak perdagangan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Penarikan bea cukai di Bandar atau pelabuhan perdagangan diserahkan kepada seorang pejabat yaitu syahbandar atau pejabat kerajaan yang ditunjuk.²¹ Pejabat kerajaan ini bertugas membantu urusan Sultan dalam hal mengatur perdagangan, mereka juga yang bertugas melancarkan urusan perdagangan serta menerima pajak dari para pedagang.

Selain itu dalam menjalankan perdagangan dengan rakyat Sultan Mahmud Badaruddin I memberlakukan sistem Tibang (Tiban) dan Tukong (Tukon). Memberlakukan sistem tiban dan tukon dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang juga berfungsi sebagai pajak. Masyarakat yang menjalankan sistem ini akan mendapatkan hasil dari penjualan dengan harga yang lebih rendah. Walaupun demikian masyarakat tetap mematuhi peraturan seperti ini, karena Sultan lah yang mengatur semua urusan produksi dan perdagangan yang ada di wilayah Palembang.

Mengenai penghasilan kesultanan bahwa di Palembang setiap kapal yang masuk dikenakan bea pelabuhan, yang besarnya menurut banyaknya anak kapal. Untuk Bangka ditetapkan dalam peraturan mengenai kewajiban-kewajiban dari rakyat Bangka, tentang kewajiban mengeluarkan sepotong timah tiban (cukai).²²

Kapal-kapal pedagang yang datang dari luar Palembang untuk menjual dan membeli barang dagang di Palembang akan dikenakan pajak pelabuhan. Hasil dari pajak tersebut kemudian dimasukkan kedalam kas kesultanan, melalui pajak dan upeti inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi Kesultanan Palembang.

²¹ Djoko Suryo, "Ekonomi Masa Kesultanan," dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, hlm. 284

²² Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya", dalam K.H.O. Gadjahnata, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, hlm. 97

4. Dampak Kebijakan Ekonomi SMB I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang

Kemajuan merupakan suatu upaya untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dengan kemajuan akan terjadinya suatu perubahan yang diinginkan kearah yang lebih maju. Perekonomian yang baik dalam Kesultanan Palembang mampu menciptakan kemakmuran. Dampak dari kebijakan ekonomi berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, kemajuan serta pembangunan di Kesultanan Palembang.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I Kota Palembang dibangun menjadi sebuah kota modern. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penataan kampung-kampung dan jalan-jalan. Sultan Mahmud Badaruddin I juga meletakkan pembangunan bangunan-bangunan monumental Palembang, termasuk diantaranya Bangunan Kuto Lamo, Makam Kawah Tengkreup serta bangunan Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (Masjid Agung Palembang), Sultan Mahmud Badaruddin I juga memprakarsai pembangunan Benteng Kuto Besak pada tahun 1737.²³

a. Kawah Tengkreup

Sultan Mahmud Badaruddin I memerintahkan untuk melakukan pembangunan makam. Dimana bangunan ini merupakan bangunan batu pertama yang dibuatnya, sebelum memerintahkan pembangunan Kuto Tengkuruk dan Masjid Sultan. Makam ini dibuat pada sekitar tahun 1728, bangunan keraton ini dibangun atas perintah Sultan Mahmud Badaruddin I yang diresmikan pada 17 September 1737.²⁴

Nama Tengkreup dipakai untuk menyebut kompleks makam ini karena pada atap bangunan yang menaungi makam Sultan Mahmud Badaruddin I terbuat dari beton dan berbentuk kawah yang tertelungkup. Kawah adalah sejenis kuali besar yang digunakan untuk memasak.²⁵ Penamaan makam ini diambil dari bentuk kubah yang mirip seperti kawah atau kuali yang terbalik, oleh karena itu makam ini dikenal sebagai Kawah Tengkreup. Di dalam kompleks Makam Kawah Tengkreup terdapat beberapa makam Sultan Palembang beserta para zuriatnya,

²³ Nanang S. Soetadji, "*Kesultanan Palembang*", dalam Djohan Hanafiah (ed.), *Perang Palembang Melawan VOC*. (Palembang: Pemerintah Kotamadya Palembang, 1996.), hlm: 10-11

²⁴ Djohan Hanafiah. *Dari Kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang*, hlm. 33

²⁵ Dinas Budpar. "*Kota Wisata Sungai: Masjid Ki Marogan*", Buku Saku. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang., hlm. 21

b. Keraton Kuto Batu

Bangunan ini merupakan bangunan keraton yang dikelilingi oleh tembok dari batu dengan pintu gerbang kokoh yang menghadap ke Sungai Musi. Bangunan keraton ini dibangun atas perintah Sultan Mahmud Badaruddin I yang peresmian pemakaiannya dilakukan pada tanggal 17 September 1737 setelah lebih dari 10 tahun memegang tampuk pemerintahan Palembang. Letaknya di tanah keraton agak kearah Sungai Tengkuruk dan Sungai Musi.²⁶

Mengenai gambaran Kuto Batu sendiri ada dua orang Eropa yang menuliskannya, yaitu William Marsden dan J.C. M Radermacher. Marsden dalam kitabnya yang terkenal *History of Sumatra* mendeskripsikan: “dalem atau istana dikelilingi oleh dinding tembok yang tinggi, tak seorang Eropa pun tahu tentang bagian dalamnya, dan tampaknya dalam keadaan besar, mengagumkan dan banyak sekali ornamen dibagian luarnya.

c. Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo

Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo merupakan salah satu warisan sejarah peradaban Islam yang ada di Palembang. Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo yang mulanya dikenal dengan nama Masjid Sultan kemudian diganti nama menjadi Masjid Agung, merupakan bangunan yang dibuat atas perintah dari Sultan Mahmud Badaruddin I. Bangunan masjid ini merupakan kelengkapan dari sebuah kota yang bernuansa Islam.²⁷ Peresmian peletakan batu pertama Masjid ini dilakukan pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah dan peresmian pemakaiannya dilakukan pada tanggal 28 Jumadil Awal 1151 H. (26 Mei 1748M).²⁸

Proses pembangunan Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo yang dibangun pada masa SMB I menggunakan bahan-bahan yang mendatangkan dari wilayah Uluhan hingga luar Palembang, hal ini memerlukan biaya yang banyak, selain itu terbukti dari SMB I juga mampu mendatangkan arsitek dari Eropa. Sejak

²⁶ Djohan Hanafiah. *Dari Kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang*, hlm. 34

²⁷ Djohan Hanafiah, *dari Kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang*, hlm. 36

²⁸ Yayasan Masjid Agung Palembang, *Sekayang Pandang Masjid Sultan Mahmud Badaruddin*, Palembang, 2019, hlm. 4

berdirinya Masjid ini banyak mengalami perkembangan serta perubahan. Masjid yang terletak di tengah-tengah pusat kota, dekat Benteng Kuto Besak dan tidak jauh dari sungai Musi serta dekat dengan pasar 16 Ilir. Kemajuan peradaban Islam di Palembang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang membawa banyak perubahan. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh Sultan memperlihatkan bahwa Sultan juga sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya.

E. KESIMPULAN

Palembang mendapat banyak julukan atas keberhasilan dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Bagaikan pusat perdagangan di Eropa yaitu Venesia yaitu, maka Palembang mendapat julukan Het Indische Venetie. Bahkan nama Darussalam diterjemahkan de stad des vredes yang berarti tempat yang tentram. Perkembangan kota Palembang pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I mengalami kemajuan dan juga modernisasi. Berbagai pembangunan dilakukan untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Penghasilan kesultanan Palembang masa Sultan Mahmud Badaruddin I berasal dari berbagai sumber. Besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Kesultanan Palembang merupakan faktor penting terbentuknya Palembang menjadi kota yang maju disertai juga dengan jumlah penduduk yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

Ali Amin. "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya". Dalam K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI-Press. 1986

Dinas Budpar. "Kota Wisata Sungai: Masjid Ki Marogan", *Buku Saku*. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.

Djohan Hanafiah. *Dari Kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang*.

Djohan. Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.

Djoko Suryo, "Ekonomi Masa Kesultanan," dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002.

- Indri Safitri, “Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M”, Skripsi, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).
- J.I. Van Sevenhoven, Lukisan Tentang Ibukota Palembang, (Yogyakarta: Ombak, 2015).
- K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed.). Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan. Jakarta: UI-Press. 1986.
- M.O. Woelders. Het Sultanaat Palembang 1811-1825. Gravenhage. 1975
- Nanang S. Soetadji, “Kesultanan Palembang”, dalam Djohan Hanafiah (ed.), Perang Palembang Melawan VOC. (Palembang: Pemerintah Kotamadya Palembang, 1996.).
- Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi. Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya. Jember: Universiti Press. 2016.
- Nor Huda. Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- P. De Roo De Faille, Dari Zaman Kesultanan Palembang (terj.), (Djakarta: Bhratara, 1971).
- Yayasan Masjid Agung Palembang, “Selayang Pandang Masjid Sultan Mahmud Badaruddin” Palembang: 2019.

Sumber Naskah dan Artikel:

- ANRI, Jakarta, Contract Palembang 10 September 1755, dalam Arsip VOC, No. 41.8
- Farida, Perekonomian Kesultanan Palembang, dalam : [Journal.unj.ac.id](http://journal.unj.ac.id). diakses pada: 3 Mei 2018
- Frieda Amran, Dr Thomas Horsfield dan Pulau Banka, dalam: [Www.Beritapagi.Ac.Id](http://www.Beritapagi.Ac.Id), Diakses Pada: Jumat 12 April 2019
- Mas Sugeng, Teori Kebijakan Publik, dalam: <http://www.topihukum.com>, 2013, diakses 1 Oktober 2018.
- Melisa, Ampera dan Perubahan Orientasi Ruang Perdagangan Kota Palembang 1920an-1970an, hlm. 55-56, dalam: <https://jurnal.ugm.ac.id>. diakses pada 7 Februari 2019
- Sabtanto Joko Suprpto, Potensi, Prospek dan Pengusahaan Timah Putih di Indonesia, dalam: <http://psdg.bgl.esdm.go.id>. diakses pada: Sabtu, 9 Februari 2019.